

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Dana untuk Hunian tanpa Persekot Anjlok

Program DP nol rupiah dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Dana talangan uang muka untuk program *down payment* (DP) nol rupiah tahun depan dipangkas. Dari awalnya Rp 3 triliun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengurangi usul dana tersebut jadi Rp 1 triliun, lalu turun lagi jadi Rp 500 miliar. Pemangkasan anggaran untuk program yang diangkat dari janji kampanye Gubernur Anies Baswedan yang lalu itu lantaran penurunan perkiraan pendapatan DKI tahun depan, yaitu sebesar Rp 87,9 triliun.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kelik Indriyanto, mengatakan pengurangan anggaran talangan itu akan mengurangi jumlah unit yang bisa diikuti dalam program hunian tanpa uang muka. "Kalau dilihat dari jumlah anggarannya, pasti terkena dampak."

ujarnya di Balai Kota, kemarin.

Kemarin petang, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dan tim anggaran pemerintah Jakarta menyepakati dana talangan panjar untuk program hunian tanpa uang muka sebesar Rp 500 miliar. Kesepakatan itu akan dituangkan dalam nota kesepahaman rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Kelik mengatakan dana talangan itu hanya cukup untuk menanggung biaya sekitar 1.200 unit hunian. Hitung-hitungannya, dengan usul awal Rp 3 triliun, pemerintah DKI bisa memberikan talangan untuk 5.000 unit hunian sonder persekot.

Menurut Kelik, di DPRD muncul wacana untuk menghapus habis dana talangan tersebut. Namun pemerintah DKI berkeras agar anggaran itu tetap ada. "Kami berupaya mempertahankan agar dapat Rp 500 miliar," ucapnya. Alasannya, dia melanjutkan, DP nol rupiah merupakan program prioritas pemerintah DKI dan telah masuk kegiatan strategis daerah.

Rumah tanpa uang muka ini menjadi salah satu magnet kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun, selama dua tahun menjabat, Gubernur Anies baru merealisasi 780 unit di Apartemen Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dari target 14 ribu unit.

Kelik yakin penguangan dana talangan panjar tersebut tidak akan menyurutkan minat warga untuk mendapatkan rumah lewat program ini. "Enggak ada pembatasan pendaftaran," kata dia.

Anggota Badan Anggaran DPRD, Gembong Warsono, mengatakan sejumlah anggota Dewan sempat sepakat mencoret seluruh dana talangan uang muka program DP

nol rupiah. Sebab, program hunian tanpa uang muka itu tidak bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak.

Pemfilatan itu, menurut

Gembong, didasari besaran pendapatan masyarakat yang ingin mengikuti program ini. Syarat untuk mengikuti program hunian tanpa uang muka ialah berpenghasilan Rp 4-7 juta setiap bulan. "Kan masih banyak warga Jakarta yang penghasilannya di bawah itu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Gembong berpendapat, anggaran Rp 500 miliar itu lebih baik dialihkan ke program lain yang dia anggap lebih urgen seperti antisipasi banjir. ●